IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLT DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA PULAU KECIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND BLT POLICY IN POVERTY ALLEVIATION IN SMALL ISLAND VILLAGES OF INDRAGIRI HILIR REGENCY

Risma Nurhalizah[1], Ahmad Hadi[2]

[1,2] Universitas riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

E-mail: rismanurhalizah03@gmail.com; ahmad.h@lecturer.unri.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pulau Kecil, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pasca-pandemi dan di tengah ketidakstabilan ekonomi, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat desa serta masyarakat penerima bantuan sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT Dana Desa belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama meliputi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, rendahnya validitas dan akurasi data sosial ekonomi masyarakat, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa. Selain itu, perubahan sistem penyaluran bantuan menjadi non-tunai melalui mekanisme perbankan juga menimbulkan kendala akses bagi sebagian kelompok masyarakat. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola data, kapasitas aparatur desa, serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek transparansi, validasi data, serta pendekatan implementasi yang lebih adaptif dan kontekstual agar kebijakan BLT Dana Desa dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan, BLT Dana Desa, kemiskinan, desa, kebijakan publik*

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) policy in Pulau Kecil Village, Indragiri Hilir Regency, as a local-level instrument for poverty alleviation. Although this policy is designed to improve community welfare, particularly in the post-pandemic context and amid economic instability, its implementation continues to face various challenges. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving village officials and beneficiary communities as key informants. The findings reveal that the implementation of the BLT Dana Desa policy remains suboptimal. Key issues include inaccurate targeting of beneficiaries, low validity and reliability of socio-economic data, and limited community participation in village deliberation processes. Furthermore, the transition to a non-cash distribution system through banking mechanisms has created accessibility barriers for certain groups. These findings indicate a significant gap between policy design and field-level realities. This study concludes that policy effectiveness is strongly influenced by data governance quality, institutional capacity at the village level, and the degree of community participation. Therefore, strengthening transparency, improving data validation, and adopting a more adaptive and context-sensitive implementation approach are essential to ensure that the BLT Dana Desa policy operates effectively, accurately targeted, and sustainably.*

Keywords**:** *policy implementation, village fund cash transfer, rural governance, public policy, poverty alleviation*

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Di Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat akar rumput semakin diperkuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa yang dialokasikan dari APBN kini tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Kebijakan ini menjadi sangat krusial, terutama pasca-pandemi dan di tengah fluktuasi ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat di perdesaan. Desa Pulau Kecil di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu lokus yang menarik untuk dikaji mengingat karakteristik geografisnya dan profil kemiskinan masyarakat pesisir yang dinamis. Untuk memperkuat gambaran empiris tersebut, data terkait penyaluran BLT Dana Desa dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1 Jumlah Data Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir 5 Tahun Terakhir

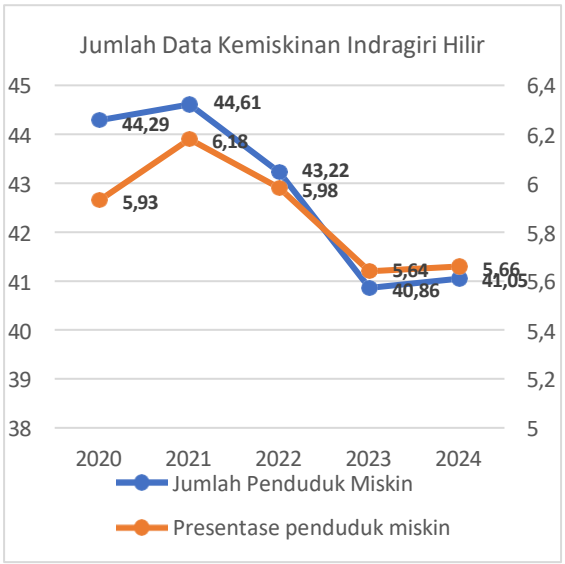

Sumber: BPS Indragiri Hilir, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa dinamika jumlah penerima BLT Dana Desa di Desa Pulau Kecil menunjukkan adanya fluktuasi dari waktu ke waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penetapan penerima bantuan belum sepenuhnya stabil dan berpotensi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan, validitas data, serta mekanisme musyawarah desa. Secara kritis, fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan dalam memastikan ketepatan sasaran program. Hal ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kapasitas institusi lokal dalam mengelola data dan mengambil keputusan yang akuntabel.

Implementasi kebijakan tidak sekadar proses administratif, melainkan interaksi kompleks antara tujuan kebijakan, pelaksana, dan lingkungan sosial politik. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana kebijakan BLT Dana Desa diimplementasikan di Desa Pulau Kecil serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program tersebut dalam menanggulangi kemiskinan. Motivasi penelitian ini didorong oleh adanya fenomena ketidaktepatan sasaran yang sering terjadi dalam distribusi bantuan sosial di berbagai daerah. Kondisi tersebut menuntut adanya evaluasi objektif di tingkat desa agar manfaat dana desa benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Landasan teoretis yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Model ini menekankan pada tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan implementasi, serta variabel eksternal yang mempengaruhi proses implementasi.

Dengan menggunakan kerangka ini, analisis tidak hanya berfokus pada output distribusi bantuan, tetapi juga pada dinamika proses implementasi yang terjadi di tingkat desa. Hal ini penting untuk memahami apakah kebijakan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala struktural. Permasalahan seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pendataan, serta kurangnya transparansi dalam proses penentuan penerima bantuan seringkali menjadi hambatan utama. Selain itu, pendekatan kebijakan yang cenderung seragam dinilai kurang mampu mengakomodasi keragaman kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal.

Dalam konteks Desa Pulau Kecil, tantangan implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah pesisir yang relatif sulit dijangkau. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas tidak hanya berdampak pada distribusi bantuan, tetapi juga mempengaruhi kualitas koordinasi antar pelaksana kebijakan. Selain itu, karakteristik masyarakat yang bergantung pada sektor informal dan memiliki tingkat mobilitas ekonomi yang tinggi turut mempersulit proses identifikasi penerima bantuan yang tepat sasaran. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang tidak kontekstual berpotensi menimbulkan ketidakefektifan program.

Permasalahan lain yang krusial adalah terkait dengan validitas data penerima bantuan. Dalam banyak kasus, data yang digunakan tidak diperbarui secara berkala sehingga tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Hal ini berimplikasi pada munculnya ketidaktepatan sasaran yang dapat memicu ketidakpuasan bahkan konflik sosial di tingkat desa. Selain itu, lemahnya mekanisme verifikasi dan kurangnya keterlibatan aktor lokal dalam proses pendataan memperburuk kualitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan sistem data menjadi kebutuhan yang mendesak.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Idealnya, proses penentuan penerima BLT Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang inklusif dan partisipatif. Namun dalam praktiknya, partisipasi tersebut seringkali masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan keterlibatan yang substantif. Rendahnya partisipasi ini dapat mengurangi legitimasi kebijakan serta membuka peluang terjadinya bias dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan BLT Dana Desa tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan antara konsep kebijakan yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan. Dengan pendekatan yang kritis dan berbasis data empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih adaptif, efektif, dan berkeadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari individu maupun kelompok terkait dengan masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014; Neuman, 2014). Pendekatan ini secara umum digunakan

CC BY NC SA

untuk meneliti fenomena kehidupan masyarakat, perilaku, serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan tertentu. Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, dan dokumen, bukan angka-angka statistik.

Pada penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pulau Kecil, Kabupaten Indragiri Hilir. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif proses penyaluran bantuan serta dinamika yang terjadi di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan data, serta faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas program. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena secara kontekstual dan mendalam (Hardani et al., 2020; Rahman et al., 2022). Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa (Yin, 2018). Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Pulau Kecil, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa seperti Kaur Umum, Kasi Keuangan, dan Kasi Kesejahteraan, serta masyarakat yang terdiri dari penerima dan non-penerima BLT Dana Desa. Pemilihan informan yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif serta menghindari bias informasi dari satu sudut pandang saja, sehingga memungkinkan triangulasi perspektif dalam analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari informan terkait dengan proses implementasi kebijakan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) serta proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, seperti laporan realisasi Dana Desa, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), serta dokumen kebijakan yang relevan. Kombinasi teknik ini penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam (Yusuf, 2014; Rahman et al., 2022).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan terus melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang fleksibel, namun tetap membutuhkan ketelitian agar tidak terjadi bias interpretasi (Haryoko et al., 2020).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

CC BY NC SA

(Naamy, 2019). Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa penelitian kualitatif tetap memiliki keterbatasan, terutama terkait subjektivitas informan dan interpretasi peneliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengecekan ulang data serta refleksi kritis selama proses penelitian untuk menjaga validitas temuan.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Pulau Kecil, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang relevan dengan fokus penelitian. Desa ini menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa, terutama terkait dengan aksesibilitas, validitas data, serta dinamika sosial masyarakat. Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan bahwa studi kasus dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena kebijakan dalam konteks tertentu (Yin, 2018).

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pulau Kecil

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Sabatier & Mazmanian (1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh tiga kelompok variabel: (1) karakteristik masalah (tractability of the problem), (2) karakteristik kebijakan (ability of statute to structure implementation), dan (3) variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Berikut adalah hasil analisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pulau Kecil berdasarkan ketiga variabel tersebut.

Karakteristik Masalah (Tractability of the Problem)

Karakteristik masalah menggambarkan tingkat kerumitan persoalan yang dihadapi dalam implementasi BLT Dana Desa. Penelitian menemukan bahwa masalah yang ditangani memiliki tingkat kesulitan relatif tinggi, yang tercermin dari empat aspek berikut.

Kesulitan teknis pelaksanaan menjadi hambatan utama. Pemerintah desa tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang baku, sehingga pelaksanaan program sangat bergantung pada pengalaman dan interpretasi aparat pelaksana. Sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Pulau Kecil: "Kesulitan yang dihadapi pemerintah desa adalah pendataan, karena pendataan yang berubah setiap tahunnya dan yang memegang tanggung jawab berbeda-beda orang" (wawancara, 18 November 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Mubarok & Slamet (2022) bahwa pendataan menjadi kendala utama implementasi BLT Dana Desa di tingkat desa.

Tingkat kemajemukan kelompok sasaran juga memperumit implementasi. Masyarakat Desa Pulau Kecil memiliki latar belakang pendidikan dan mata pencaharian yang beragam. Data menunjukkan bahwa dari 4.465 jiwa penduduk (2025), sebagian besar bekerja sebagai petani, buruh tani, dan wiraswasta informal dengan penghasilan tidak tetap. Keragaman ini menyebabkan pemerintah desa kesulitan menetapkan kriteria penerima secara seragam. Seperti diakui Plt. Kasi Kesejahteraan: "Kesulitan yang dihadapi pemerintah desa adalah segi pendataan... contoh melihat kondisi rumah yang bagus namun penghasilannya kurang... itu membuat kami bingung" (wawancara, 5 November 2025).

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi tergolong sangat terbatas. Jumlah penerima BLT Dana Desa hanya 28-31 orang per tahun, sementara total penduduk mencapai lebih dari 4.000 jiwa dan masih terdapat 178 calon penerima bantuan kemiskinan lainnya yang belum terakomodasi (Gambar 5.2). Kaur Keuangan Desa Pulau Kecil menyatakan: "Belum mencukupi karena masih banyak masyarakat yang belum penerima bantuan

BLT Dana Desa" (wawancara, 5 November 2025).

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan juga belum tercapai optimal. Penerima bantuan cenderung bergantung pada bantuan, sementara masyarakat tidak penerima menuntut keadilan dan pemerataan. Seorang penerima disabilitas mengaku: "Saya merasa terbantu tetapi saya bergantung dengan bantuan ini karena saya buta tidak bisa bekerja" (wawancara, 20 November 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa program lebih berfungsi sebagai bantuan jangka pendek dibandingkan instrumen transformasi perilaku jangka panjang.

Karakteristik Kebijakan (Ability of Statute to Structure Implementation)

Karakteristik kebijakan merupakan variabel kedua dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut Sabatier & Mazmanian (1980). Variabel ini menekankan pada sejauh mana ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan mampu mengarahkan dan mengatur proses implementasi secara efektif. Dalam implementasi BLT Dana Desa di Desa Pulau Kecil, karakteristik kebijakan dianalisis melalui kejelasan isi kebijakan, dukungan teoritis, alokasi sumber daya finansial, keterpautan antar institusi pelaksana, konsistensi aturan, komitmen aparat, serta akses partisipasi kelompok luar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kebijakan telah dirumuskan dengan cukup jelas, dalam praktiknya kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menstrukturkan implementasi di tingkat desa.

Kejelasan isi kebijakan pada dasarnya telah dipahami oleh aparat pelaksana, namun masih terdapat kelemahan pada aspek fleksibilitas implementasi di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan interpretasi antara perangkat desa dalam memahami kriteria penerima bantuan. Bapak Fathur Rahman selaku Kaur Umum menyatakan bahwa peraturan "sudah jelas tetapi seharusnya diperbaiki lagi karena kondisi ekonomi setiap desa itu berbeda" (wawancara, 5 November 2025). Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat seragam secara nasional tidak selalu mampu mengakomodasi kondisi sosial ekonomi lokal yang berbeda-beda. Sementara itu, Bapak Abdul Hadi selaku Plt. Kasi Kesejahteraan menilai bahwa "regulasi dalam mencari masyarakat miskin masih susah memenuhi kategori dalam peraturan" (wawancara, 5 November 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial di tingkat desa.

Gambar 2: Dokumentasi Musyawarah Desa khusus BLT Dana Desa (penetapan dan validasi penerima)



Sumber: Kantor Desa Pulau kecil, 2025

Program BLT Dana Desa memiliki landasan regulasi yang cukup kuat dan berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Namun, kekuatan regulasi tersebut tidak selalu diikuti oleh pemahaman yang merata di tingkat pelaksana. Bapak Agus Habib selaku Ketua BPD Desa Pulau Kecil menyatakan bahwa program "sudah sesuai tetapi tetap ada kendala dalam penerapan di desa karena kategori miskin ekstrem jarang ditemukan" (wawancara, 18 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan penyesuaian terhadap konteks lokal agar

tidak bersifat terlalu administratif.

Dukungan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan masih sangat terbatas. Bapak Miskan selaku RW 01 Parit 10 menyatakan bahwa "untuk sosialisasi dari kecamatan atau kabupaten belum ada, hanya dari pihak desa saja" (wawancara, 12 November 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi informasi kebijakan tidak berjalan secara optimal dari level atas ke bawah. Akibatnya, pemahaman aparatur desa terhadap teknis pelaksanaan masih bergantung pada pengalaman internal, bukan pada pelatihan formal.

Alokasi sumber daya finansial merupakan aspek penting dalam menentukan kapasitas implementasi kebijakan. Data menunjukkan bahwa meskipun APBDes mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi BLT Dana Desa tidak mengalami peningkatan signifikan bahkan cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan fiskal desa dalam memenuhi ketentuan alokasi maksimal.

Ibu Nurlaila selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa "tidak memaksimalkan 15% karena kendala anggaran dan kas desa tidak mencukupi" (wawancara, 5 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan fiskal desa yang terbatas. Akibatnya, jumlah penerima bantuan tidak dapat diperluas meskipun masih terdapat masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan.

Keterpautan antar institusi pelaksana juga menunjukkan adanya kelemahan koordinasi. Dalam praktiknya, keterlibatan RT dan RW dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Bapak S.T. Hasanuddin selaku RT 04 menyatakan bahwa "RT tidak dilibatkan dalam penyaluran, hanya saat pendataan saja" (wawancara, 8 November 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur implementasi masih bersifat top-down.

Terdapat juga kendala partisipasi karena keterbatasan waktu dan kesesuaian jadwal musyawarah. Hal ini menyebabkan tidak semua aktor lokal dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif Sabatier & Mazmanian (1980), lemahnya keterpautan antar aktor pelaksana akan mengurangi efektivitas implementasi kebijakan.

Komitmen Aparat, Konsistensi Aturan, dan Akses Partisipasi

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan pada dasarnya cukup tinggi, namun belum sepenuhnya diiringi dengan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, para perangkat desa menyatakan bahwa mereka mendukung penuh program BLT Dana Desa sebagai instrumen dalam mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Bapak Abdul Hadi selaku Plt. Kasi Kesejahteraan menyatakan bahwa "komitmen kami siap membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui program BLT Dana Desa ini" (wawancara, 5 November 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya komitmen formal yang cukup kuat dari aparat pelaksana dalam mendukung tujuan kebijakan sebagaimana diatur dalam regulasi.

Komitmen tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan konsistensi pelaksanaan tugas di tingkat bawah. Bapak Miskan selaku RW 01 Parit 10 mengungkapkan bahwa "kedisiplinan RT/RW masih kurang karena kesulitan menyesuaikan waktu dengan pekerjaan dan musyawarah desa" (wawancara, 12 November 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen aparat di tingkat bawah masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pekerjaan utama dan keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat sepenuhnya fokus pada pelaksanaan kebijakan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini dapat melemahkan efektivitas koordinasi antar aktor pelaksana (Subianto, 2020).

CC BY NC SA

Gambar 3: Tingkat Kehadiran RT/RW dalam Musyawarah Desa BLT Dana Desa 2023-2025

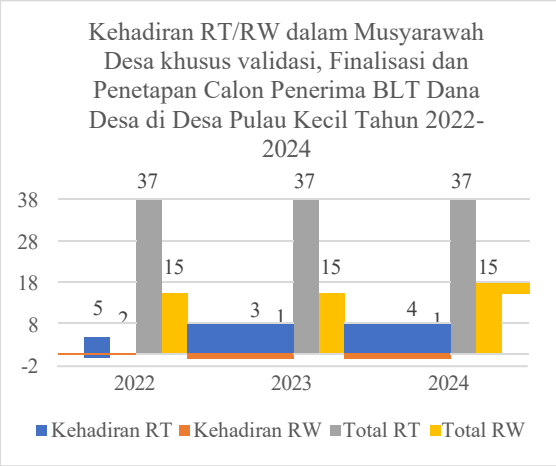

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Komitmen aparat, konsistensi aturan dalam pelaksanaan BLT Dana Desa juga masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara formal kebijakan telah ditetapkan secara jelas dari pemerintah pusat hingga desa, dalam praktiknya terdapat perbedaan interpretasi dalam implementasi di lapangan. Bapak Fathur Rahman selaku Kaur Umum menyatakan bahwa pelaksanaan program "kurang adil karena masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan sementara penerima yang sama sering muncul kembali" (wawancara, 5 November 2025). Hal ini menunjukkan adanya indikasi inkonsistensi dalam proses penetapan dan pembaruan data penerima bantuan.

Perubahan mekanisme penyaluran dari tunai ke non-tunai melalui rekening juga menimbulkan tantangan baru dalam implementasi kebijakan. Aparat desa menyatakan bahwa perubahan ini menyulitkan proses distribusi, terutama bagi masyarakat lanjut usia yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan secara teknis belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan kondisi sosial masyarakat di tingkat desa.

Dari aspek akses partisipasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan masih sangat terbatas. Partisipasi masyarakat lebih banyak terjadi pada tahap pendataan awal, sementara pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi program, keterlibatan masyarakat cenderung minim. Bapak Agus Habib selaku Ketua BPD menyatakan bahwa "masyarakat hanya mengetahui hasil akhir tanpa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan" (wawancara, 18 November 2025).

Ibu Sri Lestari selaku masyarakat tidak penerima BLT Dana Desa juga mengungkapkan bahwa "masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan maupun pengawasan program" (wawancara, 20 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih cenderung bersifat top-down, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh aparat desa tanpa keterlibatan aktif masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Rendahnya akses partisipasi ini berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan program. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, maka potensi terjadinya ketidaktepatan sasaran dan ketidakpuasan publik menjadi lebih besar. Dalam kerangka implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan legitimasi dan transparansi program (Engkus, 2022).

Secara keseluruhan, variabel karakteristik kebijakan menunjukkan bahwa meskipun komitmen aparat terhadap program BLT Dana Desa cukup tinggi secara formal, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek konsistensi pelaksanaan aturan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Ketidaksinkronan antara regulasi formal dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih membutuhkan

penguatan pada aspek koordinasi, transparansi, serta keterlibatan aktor lokal.

Variabel Lingkungan (Nonstatutory Variables Affecting Implementation)

Variabel lingkungan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Sabatier & Mazmanian (1980). Variabel ini mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik, perhatian terhadap isu kebijakan, sikap kelompok pemilih, serta kapasitas dan komitmen aktor pelaksana. Dalam implementasi BLT Dana Desa di Desa Pulau Kecil, variabel lingkungan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas program di lapangan. Kondisi lingkungan yang tidak sepenuhnya kondusif menyebabkan implementasi program berjalan tidak optimal dan cenderung menghadapi berbagai hambatan operasional.

Kondisi Sosial Ekonomi dan Teknologi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi implementasi program BLT Dana Desa. Masyarakat Desa Pulau Kecil memiliki karakteristik ekonomi yang heterogen dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil, terutama pada sektor pertanian dan pekerjaan informal. Bapak Juliandra selaku RT 01 Parit 10 menyatakan bahwa "kondisi ekonomi masyarakat berbeda-beda sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan BLT Dana Desa" (wawancara, 18 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan dasar masyarakat, namun juga sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi lokal.

Perubahan sistem penyaluran bantuan dari tunai ke non-tunai melalui rekening perbankan menimbulkan tantangan baru, khususnya bagi kelompok rentan. Ibu Aisyah selaku penerima lanjut usia mengungkapkan bahwa "sulit menarik bantuan melalui bank karena jaraknya jauh dan saya tidak memahami prosesnya" (wawancara, 20 November 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dalam sistem administrasi belum sepenuhnya sejalan dengan kesiapan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks implementasi kebijakan, kesenjangan digital ini menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam proses distribusi bantuan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam penyaluran bantuan belum sepenuhnya inklusif. Masyarakat lanjut usia dan kelompok rentan lainnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan, sehingga efektivitas program menjadi berkurang. Penelitian Prastiwi & Sukmana (2025) juga menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan akses teknologi masih menjadi kendala dalam implementasi BLT Dana Desa di berbagai wilayah.

Perhatian Publik terhadap Program

Perhatian masyarakat terhadap program BLT Dana Desa menunjukkan pola yang fluktuatif dan sangat bergantung pada kepentingan individu. Sebagian masyarakat menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap program, terutama terkait siapa saja yang menjadi penerima bantuan setiap tahunnya. Bapak Miskan selaku RW 01 Parit 10 menyatakan bahwa "masyarakat selalu mencari informasi terkait penerima BLT Dana Desa karena berharap dapat menerima bantuan tersebut" (wawancara, 12 November 2025).

perhatian tersebut cenderung menurun ketika masyarakat tidak termasuk dalam daftar penerima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap program lebih bersifat instrumental dibandingkan substantif. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian publik belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai bentuk partisipasi sosial yang berkelanjutan.

CC BY NC SA

Dukungan Publik dan Sikap Kelompok Masyarakat

Dukungan publik terhadap program BLT Dana Desa pada dasarnya cukup tinggi, namun bersifat kondisional. Ibu Sumarni selaku penerima bantuan menyatakan bahwa "program ini membantu, tetapi masih banyak masyarakat yang layak namun tidak menerima bantuan" (wawancara, 20 November 2025). Sementara itu, Ibu Masnidar mengeluhkan bahwa "penyaluran sering terlambat tanpa informasi yang jelas" (wawancara, 20 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi program di lapangan.

Sikap kelompok masyarakat (constituency groups) juga menunjukkan perbedaan pandangan antara penerima dan non-penerima bantuan. Kelompok penerima cenderung mendukung program karena merasakan manfaat langsung, sedangkan kelompok non-penerima lebih kritis terhadap aspek keadilan distribusi. Ibu Sri Lestari menyatakan bahwa "program ini bermanfaat, tetapi belum adil karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan" (wawancara, 20 November 2025). Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik persepsi di tingkat masyarakat yang dapat memengaruhi legitimasi program.

Dukungan Kewenangan dan Kapasitas Pelaksana

Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten secara formal sudah tersedia, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksinkronan data dan implementasi. Kepala Desa Pulau Kecil menyatakan bahwa "data dari atas masih menggunakan data lama sehingga perlu validasi ulang di tingkat desa" (wawancara, 18 November 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi vertikal antara pemerintah daerah dan desa belum berjalan optimal.

Kapasitas pelaksana di tingkat desa juga masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal digitalisasi dan pendataan. Bapak Abdul Hadi menyatakan bahwa "pendataan masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya memahami sistem digital" (wawancara, 5 November 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas teknis menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan modern berbasis data.

Secara keseluruhan, variabel lingkungan menunjukkan bahwa implementasi BLT Dana Desa di Desa Pulau Kecil sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan akses teknologi, dinamika dukungan publik, serta kapasitas kelembagaan desa. Kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung ini menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat operasional. Dalam kerangka Sabatier & Mazmanian (1980), variabel lingkungan ini memperkuat temuan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kondisi eksternal yang melingkupinya.

Faktor Penghambat Implementasi

Berdasarkan hasil analisis, faktor penghambat utama implementasi BLT Dana Desa di Desa Pulau Kecil adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Perangkapan jabatan pada perangkat desa menyebabkan beban kerja tidak proporsional, sehingga pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan tidak optimal. Hal ini sejalan dengan temuan Iqbal & Nurhidayani (2022) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang masih kurang menjadi kendala dalam implementasi BLT Dana Desa.

CC BY NC SA

Faktor penghambat lainnya meliputi: (1) ketiadaan SOP tertulis di tingkat desa; (2) keterbatasan alokasi anggaran yang tidak mencapai batas maksimal; (3) lemahnya koordinasi antara perangkat desa dan RT/RW; (4) minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan program; serta (5) kondisi geografis desa yang luas dan akses terbatas.

KESIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Pulau Kecil belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kesulitan teknis pelaksanaan, kemajemukan kelompok sasaran yang tinggi, keterbatasan proporsi penerima bantuan, serta belum tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan. Meskipun kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, implementasinya terhambat oleh keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antar institusi pelaksana, dan minimnya partisipasi publik. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa akibat perangkapan jabatan dan beban kerja yang tinggi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan untuk para pihak yang membantu penyelesaian karya tulis ilmiah ini, seperti atasan unit kerja, penyandang dana, lembaga atau kelompok dan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta.

Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. CV. Pustaka Setia.

Creswell, J. W. (2014). Research Design pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.

Edwards lll, G. C. (1980). Implementing public policy. Edward Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Engkus. (2022). Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, dan evaluasi serta perubahan). Penerbit PT Kimshafi Alung Cipta.

Govindo, P. jaya, Suharyanto, A., & Lubis, K. (2024). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Miskin di Desa Urung Purba Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 6(2), 225–232.

Gumelar, R., Susanti, E., Dadang, M., & Munajat, E. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022. Jurnal Administrasi Negara), Februari, 15, 86–94.

Hardani, Auliya, N. hikmatul, Andriani, H., Fardani. Roushandy Asri, Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). Badan Penerbit UNM

Iqbal, M. A., & Nurhidayani, L. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Kepada Masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Lombok Timur. Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan, 8(2), 119–130.

Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. PENERBIT UNG Press Gorontalo Anggota IKAPI.

Maulana, D., & Nugroho, arif. (2019). Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik). CV. AA. Rizky.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis

A Methods Sourcebook. SAGE Publications Ltd.

Mubarok, A. Z., & Slamet. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi pada Desa Pendarungan Kecamatan Kabat). SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 97–101.

Naamy, N. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Neuman, W. L. (2014). Social research methods : qualitative and quantitative approaches. Pearson New International Edition.

Nur Arivah Endah Prastiwi, & Hendra Sukmana. (2025). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sumorame Kecamatan Candi. Journal Publicuho, 8(1), 106–120.

Peyon, K., Sinurat, M., & Kurniawati, L. (2023). Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat (Command Center) Di Kabupaten Yalimo (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Yalimo). Management Studies and Entrepreneurship Journal, 4(1), 350–363.

Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Penerbit PT Grasindo.

Rahman, A., Wirastika Sari, N. M., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Amena ode, A. P., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). Metode Penelitian Ilmu Sosial (A. Masruroh, Ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.

Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). Conceptual Framework The Implementation Of Public Policy: A Framework Of Analysis.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit AIPI Bandung, Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Widodo, joko. (2021). Analisis Kebijakan Publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan. Media Nusa Creative.

Yin, R. K. (2018). Studi Kasus Desain & Metode. PT. RajaGrafindo Persada.

Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Prenadamedia Group.